

Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur

Lativa Yuswanita¹, Yuli Fitriyani², Nur Fadillah Suprayitno³

Artikel info



Affiliation: ^{1 2 3}Akuntansi
Perpajakan, Politeknik Negeri
Tanah Laut, Tanah Laut,
Indonesia

***Correspondence:**

lativayuswanita@politale.ac.id

DOI: -

Citation:

Yuswanita, L., Fitriyani, Y., &
Suprayitno, N. F. (2026).
Transparansi laporan keuangan
pemerintah daerah dan
implikasinya terhadap
kepercayaan publik: Sebuah
tinjauan literatur. *Jurnal Ilmiah
Akuntansi dan Perpajakan*,
1(1), 81–90.

Artikel History:

Received:
24 Juni 2026

Revised:
27 Juni 2026

Accepted:
29 Juni 2026



Abstract

Background: Transparency in local government financial reporting is essential for promoting accountability and strengthening public trust, particularly in the era of fiscal decentralization, which grants local governments greater authority to manage regional budgets (APBD). However, previous studies have reported inconsistent findings regarding its effectiveness in fostering public trust. **Objective:** This study analyses the role of transparency in local government financial reporting in strengthening public accountability and building public trust. **Research Methods:** This study employs a qualitative approach using the Systematic Literature Review (SLR) method. Data were analysed through identification, selection, thematic categorization, and conceptual synthesis. **Research Results:** The findings indicate that transparency, supported by effective internal controls, performance-based management, and digitalized reporting systems, significantly enhances public accountability, thereby strengthening government legitimacy and public trust. **Novelty of the Research:** This study proposes an integrated conceptual framework linking transparency, accountability, governance quality, digitalization, and public trust in local government financial management.

Keywords: Local Government Financial Reporting Transparency, Public Accountability, Government Governance, Digital Transformation, Public Trust.

Abstract

Latar Belakang: Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah menjadi aspek penting dalam mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik, terutama dalam era desentralisasi fiskal yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Namun, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai efektivitas transparansi dalam membangun kepercayaan masyarakat. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis peran transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dalam memperkuat akuntabilitas dan membangun kepercayaan publik. **Metode Penelitian:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) terhadap artikel ilmiah yang relevan, yang dianalisis melalui identifikasi, seleksi, pengelompokan tematik, dan sintesis konseptual. **Hasil Penelitian:** Transparansi yang didukung pengendalian internal, manajemen berbasis kinerja, dan digitalisasi pelaporan terbukti meningkatkan akuntabilitas publik yang selanjutnya memperkuat legitimasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat. **Kebaruan Penelitian:** Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual terintegrasi yang menghubungkan transparansi, akuntabilitas, tata kelola, digitalisasi, dan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keywords: Transparansi Laporan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Transformasi Digital, Kepercayaan Publik

Pendahuluan

Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan praktik tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Dalam kerangka desentralisasi

fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Kewenangan tersebut membawa konsekuensi berupa tuntutan akuntabilitas yang lebih tinggi, mengingat pengelolaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Oleh sebab itu, laporan keuangan daerah tidak lagi sekadar dipahami sebagai dokumen administratif rutin, melainkan sebagai sarana legitimasi publik serta instrumen kontrol dalam sistem demokrasi lokal.

Secara teoretis, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip sentral dalam tata kelola sektor publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang relevan dan dapat diakses oleh publik, sedangkan akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya publik secara terukur dan sesuai ketentuan. Berbagai studi empiris menunjukkan bahwa peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan berdampak positif terhadap mutu laporan keuangan serta memperkuat legitimasi kelembagaan pemerintah daerah ([Badewin et al., 2025](#); [Rosalinda et al., 2025](#)). Dengan demikian, transparansi bukan hanya merupakan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil kajian sistematis yang dilakukan oleh [Jannah et al. \(2025\)](#) mengindikasikan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas pengambilan keputusan publik, efektivitas pemanfaatan anggaran, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini mempertegas bahwa transparansi memiliki dimensi strategis dalam membangun modal sosial berupa kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kebijakan dan stabilitas pemerintahan daerah.

Dalam perspektif tata kelola (*governance*), transparansi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sistem pengendalian internal, mekanisme audit, serta struktur kelembagaan yang menopangnya. Pengendalian internal yang efektif memastikan proses pencatatan dan pelaporan keuangan berjalan sesuai standar, sementara audit eksternal berperan memberikan penilaian independen atas kewajaran laporan keuangan. Meski demikian, penelitian [Mahruzal et al. \(2024\)](#) menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di sejumlah pemerintah daerah masih bersifat formalistik. Publikasi laporan keuangan sering kali dilakukan untuk memenuhi tuntutan regulatif, tanpa memperhatikan kualitas penyajian, kemudahan akses, maupun relevansi informasi bagi masyarakat luas. Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara transparansi berbasis kepatuhan dan transparansi yang benar-benar substantif.

Selain aspek kelembagaan, faktor manajerial internal juga berpengaruh terhadap mutu pelaporan keuangan. [Siahay \(2023\)](#) menekankan pentingnya penerapan sistem costing serta pengelolaan berbasis kinerja guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan alokasi anggaran. Transparansi eksternal yang efektif pada dasarnya membutuhkan dukungan sistem internal yang profesional dan terintegrasi. Tanpa fondasi manajemen keuangan yang kuat, keterbukaan informasi berpotensi menjadi formalitas administratif yang tidak berdampak nyata pada peningkatan akuntabilitas.

Kemajuan teknologi informasi turut mendorong transformasi dalam praktik pelaporan keuangan sektor publik. Digitalisasi sistem akuntansi memungkinkan proses pencatatan dan publikasi informasi dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. [Irmawati et al. \(2025\)](#)

menjelaskan bahwa transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah. Integrasi sistem informasi keuangan juga memungkinkan pelaporan dilakukan secara real-time, sehingga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan anggaran ([Jannah et al., 2025](#)). Akan tetapi, [Mahruzal et al. \(2024\)](#) menggarisbawahi bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur teknologi masih menjadi tantangan dalam optimalisasi digitalisasi di berbagai daerah.

Pada akhirnya, tujuan utama transparansi pelaporan keuangan adalah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. [Santoso et al. \(2024\)](#) menemukan bahwa keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas serta trust publik. Kepercayaan tersebut mencerminkan penilaian masyarakat atas integritas, kompetensi, dan komitmen pemerintah dalam mengelola dana publik secara bertanggung jawab. Apabila transparansi tidak berjalan secara optimal, legitimasi pemerintah dapat tergerus dan efektivitas kebijakan publik berpotensi melemah.

Meskipun kajian mengenai transparansi, akuntabilitas, digitalisasi, dan tata kelola telah banyak dilakukan, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang perlu mendapat perhatian. Pertama, sebagian besar penelitian mengkaji variabel-variabel tersebut secara terpisah, sehingga belum terbentuk kerangka konseptual yang menyatukan hubungan antarvariabel secara komprehensif. Kedua, studi yang secara eksplisit menghubungkan transparansi laporan keuangan dengan pembentukan kepercayaan publik masih relatif terbatas, sehingga mekanisme hubungan keduanya belum tergambarkan secara mendalam. Ketiga, pembahasan mengenai digitalisasi pelaporan keuangan lebih banyak menitikberatkan pada efisiensi teknis, sementara keterkaitannya dengan legitimasi institusional dan pembentukan trust belum banyak dieksplorasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, diperlukan suatu kajian literatur yang menyusun sintesis konseptual secara sistematis dan integratif mengenai keterkaitan antara transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas, sistem pengendalian internal, transformasi digital, dan kepercayaan publik. Pendekatan integratif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan model tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada penguatan legitimasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini mengangkat judul **“Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur.”**

Tinjauan Literatur

Transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan prinsip penting dalam good governance yang menekankan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat. Transparansi memungkinkan publik memperoleh informasi mengenai pengelolaan APBD sehingga dapat meningkatkan pengawasan dan mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Transparansi yang efektif akan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik, yaitu kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara terbuka dan terukur.

Keberhasilan transparansi dipengaruhi oleh kualitas sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan kualitas penyajian informasi keuangan. Transparansi dan akuntabilitas yang didukung oleh pengendalian internal serta digitalisasi pelaporan pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan publik. Dengan demikian, transparansi laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan regulatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka sebagai metode utama. Kajian pustaka dipahami sebagai strategi penelitian yang bertujuan menelaah, menafsirkan, serta mengintegrasikan temuan-temuan studi terdahulu secara terstruktur untuk memperoleh pemahaman konseptual yang lebih utuh mengenai suatu isu tertentu ([Booth et al., 2016](#); [Snyder, 2019](#)). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri perkembangan teori, membandingkan hasil penelitian sebelumnya, serta mengidentifikasi kesenjangan keilmuan (research gap) yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut.

Fokus penelitian diarahkan pada analisis kritis terhadap berbagai literatur akademik yang mengkaji keterkaitan antara akuntansi sektor publik dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yakni menyusun formulasi kontribusi teoretis akuntansi publik dalam mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab. Upaya tersebut dilakukan melalui proses sintesis yang sistematis terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder dan bersumber dari berbagai publikasi ilmiah, baik nasional maupun internasional, buku referensi yang relevan, regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, serta dokumen kebijakan yang mendukung pembahasan. Artikel yang dijadikan rujukan merupakan publikasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema transparansi laporan keuangan daerah, akuntabilitas sektor publik, digitalisasi sistem informasi keuangan, dan pembentukan kepercayaan publik. Seleksi literatur dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, relevansi substansi, tahun terbit, serta kontribusi teoritis maupun empiris terhadap pengembangan kerangka analisis.

Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran pada berbagai basis data akademik, seperti Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi, serta sumber resmi lainnya. Proses pencarian menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan topik penelitian, antara lain transparansi laporan keuangan pemerintah daerah, akuntabilitas sektor publik, tata kelola pemerintahan, digitalisasi keuangan daerah, dan kepercayaan publik. Literatur yang terkumpul kemudian disaring berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Artikel yang tidak memiliki relevansi langsung dengan isu transparansi dan trust publik tidak disertakan dalam analisis guna menjaga konsistensi dan kedalaman pembahasan.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Tahap awal berupa identifikasi dan pengelompokan literatur sesuai tema utama yang diteliti, seperti transparansi pelaporan, akuntabilitas publik, sistem pengendalian internal, transformasi digital, serta kepercayaan masyarakat. Tahap berikutnya adalah analisis komparatif, yang bertujuan untuk menemukan pola kesamaan, perbedaan, serta kecenderungan hasil penelitian sebelumnya.

Tahap terakhir merupakan proses sintesis konseptual, yakni pengintegrasian berbagai perspektif teori dan temuan empiris guna membangun kerangka hubungan yang menjelaskan implikasi transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan publik. Proses sintesis dilakukan secara sistematis dan argumentatif agar menghasilkan model konseptual yang logis, konsisten, dan memiliki kontribusi akademik. Teknik ini merujuk pada pedoman yang dikemukakan oleh [\(Snyder, 2019\)](#), yang menyatakan bahwa kajian literatur yang sistematis harus melibatkan proses seleksi, penyaringan, dan sintesis secara tematik dan reflektif, untuk menghasilkan kerangka pemahaman yang relevan, tajam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Untuk menjamin kualitas kajian, penelitian ini menerapkan prinsip credibility dan dependability dalam analisis literatur. Kredibilitas dijaga melalui penggunaan sumber yang dipublikasikan pada jurnal bereputasi dan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara itu, dependability diwujudkan dengan menjaga konsistensi interpretasi terhadap hasil penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai temuan dari studi yang memiliki fokus serupa guna meminimalkan potensi bias dan memperkuat argumentasi konseptual.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sintesis literatur yang komprehensif dan menyusun model konseptual yang dapat menjadi pijakan bagi penelitian empiris di masa mendatang, khususnya dalam menguji hubungan antara transparansi laporan keuangan pemerintah daerah dan pembentukan kepercayaan publik secara lebih mendalam.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Sintesis Literatur

Berdasarkan proses penelusuran dan seleksi artikel secara sistematis, temuan literatur menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan konsep yang bersifat kompleks dan multidimensional. Transparansi tidak dapat dimaknai sebatas kewajiban formal untuk mempublikasikan laporan keuangan, melainkan mencakup aspek keterbukaan informasi yang dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dimensi transparansi meliputi ketersediaan dokumen, kemudahan akses, kelengkapan pengungkapan, kualitas penyajian, hingga relevansi informasi terhadap kebutuhan publik [\(Jannah et al., 2025\)](#).

Sebagian besar studi empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara transparansi dan kualitas pelaporan keuangan. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh gambaran mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi anggaran daerah, sehingga laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai instrumen evaluasi kinerja pemerintah [\(Badewin et al., 2025; Rosalinda et al., 2025\)](#). Dengan demikian, transparansi berperan dalam memperkuat akuntabilitas publik dan legitimasi institusional.

Namun demikian, hasil sintesis juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara transparansi formal dan transparansi substantif. Beberapa pemerintah daerah telah memenuhi kewajiban regulatif dengan mempublikasikan laporan keuangan, tetapi penyajian informasi masih belum komunikatif atau mudah dipahami oleh masyarakat awam. Praktik transparansi di sejumlah daerah masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan keterbukaan yang partisipatif. Temuan serupa juga ditunjukkan dalam studi terkait transparansi berbasis website pemerintah daerah yang menunjukkan variasi tingkat pengungkapan informasi [\(Mahruzal et al., 2024\)](#).

Literatur juga mengindikasikan bahwa kualitas transparansi sangat dipengaruhi oleh tata kelola internal pemerintah daerah. Sistem pengendalian internal yang efektif dan penerapan manajemen berbasis

kinerja menjadi faktor krusial dalam menghasilkan laporan keuangan yang andal dan kredibel. [Siahay \(2023\)](#) menegaskan bahwa sistem costing dan pengendalian internal berbasis kinerja meningkatkan rasionalitas alokasi anggaran serta reliabilitas pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi eksternal sangat bergantung pada kualitas tata kelola internal.

Selain faktor internal, transformasi digital menjadi elemen penting dalam memperluas transparansi. Implementasi sistem informasi keuangan daerah, e-budgeting, serta Internet Financial Reporting terbukti meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelaporan ([Irmawati et al., 2025](#); Afri & Mulia, 2021). Meskipun demikian, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia, literasi anggaran masyarakat, serta kesiapan infrastruktur teknologi daerah.

Secara umum, pola hubungan yang muncul dalam sintesis literatur menunjukkan bahwa transparansi mendorong peningkatan akuntabilitas, dan akuntabilitas menjadi mekanisme yang memperkuat kepercayaan publik. Dengan demikian, transparansi dapat diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani tata kelola internal dengan pembentukan trust masyarakat ([Santoso et al., 2024](#)).

Transparansi sebagai Mekanisme Legitimasi Institusional

Dalam kerangka teori legitimasi, keberlangsungan dan stabilitas pemerintah daerah sangat bergantung pada tingkat penerimaan sosial yang diberikan oleh masyarakat. Legitimasi dipahami sebagai persepsi kolektif bahwa tindakan dan kebijakan pemerintah selaras dengan nilai, norma, dan harapan publik. Oleh karena itu, setiap kebijakan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, memerlukan justifikasi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan di ruang publik. Dalam konteks ini, transparansi laporan keuangan berfungsi sebagai sarana strategis untuk membangun dan memelihara legitimasi tersebut. Melalui keterbukaan informasi anggaran yang disampaikan secara sistematis, pemerintah daerah menunjukkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas serta kesediaan untuk diawasi oleh masyarakat ([Jannah et al., 2025](#)).

Ketersediaan informasi keuangan yang jelas dan terstruktur memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai konsistensi antara perencanaan anggaran, pelaksanaan program, dan hasil yang dicapai. Transparansi tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi media komunikasi publik yang menjembatani hubungan antara pemerintah dan warga. Ketika laporan keuangan disusun dan dipublikasikan secara terbuka, masyarakat memiliki dasar argumentatif untuk mengevaluasi kinerja pemerintah secara lebih objektif dan berbasis data.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berkontribusi dalam menurunkan tingkat ketidakpastian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah. Akses yang luas terhadap informasi keuangan dapat meminimalkan kecurigaan terhadap potensi penyimpangan atau penyalahgunaan dana publik ([Badewin et al., 2025](#)). Transparansi yang dilakukan secara konsisten juga memperkuat citra integritas dan profesionalisme aparatur birokrasi, karena menunjukkan adanya keselarasan antara komitmen normatif dan praktik nyata dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun demikian, legitimasi institusional tidak otomatis terbentuk hanya dengan mempublikasikan laporan keuangan. Transparansi akan kehilangan maknanya apabila informasi yang disajikan terlalu teknis, kompleks, atau tidak sesuai dengan kebutuhan informasi masyarakat. [Mahruzal et al. \(2024\)](#) menekankan bahwa dalam sejumlah kasus, praktik transparansi masih bersifat simbolik dan belum sepenuhnya komunikatif. Kondisi ini dapat menyebabkan kesenjangan antara informasi yang tersedia dan pemahaman publik terhadap substansi laporan tersebut.

Oleh sebab itu, kualitas penyajian informasi menjadi aspek krusial dalam membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat. Informasi yang ringkas, jelas, mudah dipahami, serta relevan dengan isu-isu publik akan lebih efektif dalam memperkuat persepsi positif terhadap pemerintah daerah. Transparansi

yang substantif yang tidak hanya membuka akses, tetapi juga memastikan keterbacaan dan kegunaan informasi akan memperkuat hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, legitimasi tidak hanya dibangun melalui keterbukaan formal, tetapi melalui transparansi yang bermakna dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Integrasi Tata Kelola Internal dan Akuntabilitas Eksternal

Temuan hasil sintesis literatur menegaskan bahwa tingkat transparansi eksternal pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas tata kelola internal yang menjadi fondasinya. Transparansi kepada publik pada dasarnya merupakan refleksi dari proses pengelolaan keuangan yang berlangsung di dalam organisasi pemerintahan itu sendiri. Apabila sistem internal tidak berjalan secara efektif, maka informasi yang dipublikasikan berpotensi tidak akurat, tidak lengkap, atau bahkan menyesatkan. Oleh karena itu, keberadaan sistem pengendalian internal yang kuat menjadi prasyarat utama dalam menjamin bahwa laporan keuangan disusun secara tepat, konsisten, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. [Siahay \(2023\)](#) menekankan bahwa tanpa dukungan struktur pengendalian yang memadai, keterbukaan informasi justru dapat menimbulkan risiko penyebaran data yang kurang reliabel dan melemahkan kredibilitas institusi pemerintah daerah.

Selain sistem pengendalian internal, pendekatan manajemen berbasis kinerja turut memperkaya makna akuntabilitas dalam sektor publik. Dalam paradigma tradisional, laporan keuangan sering kali berfokus pada aspek administratif berupa realisasi anggaran dan kesesuaian belanja dengan perencanaan. Namun, melalui pendekatan berbasis kinerja, pengelolaan anggaran dihubungkan dengan indikator output dan outcome yang terukur. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya menyajikan angka-angka realisasi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana program dan kegiatan pemerintah mencapai target yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memperluas dimensi akuntabilitas dari sekadar pertanggungjawaban finansial menuju pertanggungjawaban kinerja yang lebih substantif.

Studi yang dipublikasikan oleh [Judijanto et al. \(2024\)](#) menunjukkan informasi anggaran disusun berdasarkan sistem internal yang kuat dan dipublikasikan secara terbuka, efektivitas pengelolaan sumber daya publik cenderung meningkat. Hal ini terjadi karena proses internal yang tertata baik menghasilkan data yang kredibel, sementara transparansi eksternal memungkinkan adanya pengawasan dan evaluasi dari masyarakat maupun lembaga pengawas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa terdapat hubungan yang saling memperkuat antara penguatan sistem tata kelola internal dan implementasi transparansi eksternal. Keduanya tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk suatu mekanisme yang terintegrasi dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang komprehensif. Transparansi tanpa dukungan sistem internal yang solid akan kehilangan substansi, sementara tata kelola internal yang baik tanpa keterbukaan kepada publik akan mengurangi legitimasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, integrasi antara pengendalian internal, manajemen berbasis kinerja, dan transparansi eksternal menjadi kunci dalam membangun sistem akuntabilitas yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik.

Transformasi Digital sebagai Katalisator Transparansi

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar dalam praktik pelaporan keuangan sektor publik. Transformasi ini tidak hanya menyentuh aspek teknis pencatatan dan penyimpanan data, tetapi juga mengubah cara pemerintah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Kehadiran sistem pelaporan berbasis daring (online reporting system) memungkinkan masyarakat mengakses dokumen keuangan pemerintah daerah secara lebih cepat, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Aksesibilitas yang lebih luas ini memperkuat peluang terwujudnya keterbukaan informasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Digitalisasi pelaporan keuangan juga memberikan dampak pada peningkatan efisiensi administratif. [Irmawati et al. \(2025\)](#) menjelaskan bahwa penerapan sistem digital dalam akuntansi sektor publik mampu mempercepat proses pengolahan data, meminimalkan kesalahan pencatatan manual, serta meningkatkan akurasi laporan keuangan. Selain itu, pemanfaatan platform daring memperluas jangkauan distribusi informasi sehingga masyarakat, akademisi, maupun lembaga pengawas dapat memperoleh data keuangan daerah secara lebih mudah. Dengan demikian, transformasi digital berkontribusi dalam memperkuat transparansi melalui peningkatan kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan akses informasi.

Di sisi lain, penelitian [Albahrudin et al. \(2023\)](#) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi melalui Internet Financial Reporting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknologi semata, tetapi juga oleh kapasitas fiskal daerah dan kualitas tata kelola yang dimiliki. Daerah dengan kondisi fiskal yang lebih baik serta sistem tata kelola yang lebih matang cenderung memiliki tingkat pengungkapan informasi yang lebih komprehensif. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi merupakan bagian dari ekosistem tata kelola yang lebih luas, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan dan sumber daya yang tersedia.

Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, digitalisasi tidak dapat dipandang sebagai solusi instan terhadap permasalahan transparansi. Ketersediaan informasi secara daring tidak otomatis menjamin bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan tetap disajikan dalam format yang kompleks, penuh istilah teknis, dan kurang komunikatif, maka hambatan pemahaman publik tetap akan terjadi. Dalam kondisi demikian, keterbukaan informasi menjadi bersifat formal, tetapi belum tentu substantif.

Oleh karena itu, transformasi digital perlu diiringi dengan upaya penyederhanaan format laporan serta peningkatan kualitas penyajian informasi agar lebih ramah pengguna (*user-friendly*). Penyusunan ringkasan eksekutif, infografis anggaran, serta penjelasan naratif yang mudah dipahami dapat menjadi strategi untuk menjembatani kesenjangan antara data teknis dan pemahaman masyarakat. Selain itu, penguatan literasi anggaran melalui edukasi publik juga menjadi langkah penting agar masyarakat mampu membaca dan menafsirkan informasi keuangan secara kritis.

Apabila digitalisasi diintegrasikan dengan perbaikan kualitas penyajian informasi dan peningkatan literasi publik, maka transparansi berbasis digital (*digital transparency*) berpotensi menjadi katalisator dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Transparansi yang mudah diakses dan dipahami akan memudahkan masyarakat melakukan pengawasan, sehingga mendorong pemerintah untuk mengelola anggaran secara lebih bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, sinergi antara teknologi, tata kelola yang baik, dan partisipasi publik akan berkontribusi pada penguatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah daerah.

Transformasi dan Pembentukan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah. Tingkat kepercayaan masyarakat mencerminkan sejauh mana pemerintah dinilai memiliki integritas, kompetensi, dan komitmen dalam mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kepercayaan tidak muncul secara otomatis, melainkan terbentuk melalui proses yang melibatkan konsistensi antara informasi yang disampaikan kepada publik dan praktik nyata dalam pelaksanaan anggaran. Sintesis literatur menunjukkan bahwa *trust* masyarakat berkembang ketika terdapat kesesuaian antara laporan keuangan yang dipublikasikan dengan realitas penggunaan anggaran di lapangan. Ketika tidak ditemukan kesenjangan yang signifikan antara perencanaan, pelaporan, dan implementasi program, persepsi positif terhadap pemerintah cenderung meningkat.

Penelitian [Santoso et al. \(2024\)](#) menegaskan bahwa keterbukaan informasi yang diiringi dengan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan tingkat kepercayaan publik. Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap data dan kebijakan anggaran, sementara partisipasi publik memberikan ruang bagi warga untuk terlibat dalam proses pengawasan maupun evaluasi kebijakan. Kombinasi kedua aspek tersebut menciptakan hubungan timbal balik yang lebih transparan dan partisipatif antara pemerintah dan masyarakat.

Transparansi pada dasarnya memperkuat akuntabilitas karena menyediakan landasan informasi yang objektif bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah. Ketika data anggaran disajikan secara terbuka dan dapat diverifikasi, masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi secara rasional terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Kondisi ini berkontribusi pada penurunan tingkat skeptisisme serta mengurangi potensi prasangka negatif terhadap praktik pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dalam kerangka konseptual ini, akuntabilitas berperan sebagai variabel mediasi yang menghubungkan transparansi dengan pembentukan kepercayaan publik ([Jannah et al., 2025](#)). Artinya, transparansi tidak secara langsung menciptakan trust, tetapi melalui mekanisme akuntabilitas yang terbangun secara konsisten.

Hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik bersifat dinamis dan berkelanjutan. Transparansi yang dilakukan secara konsisten akan memperkuat akuntabilitas, dan akuntabilitas yang terjaga akan meningkatkan legitimasi serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pada saat yang sama, meningkatnya kepercayaan publik juga mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi anggaran. Partisipasi yang lebih luas tersebut pada akhirnya memperkaya praktik tata kelola dan menciptakan siklus positif antara keterbukaan, pertanggungjawaban, dan trust publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat bukan hanya hasil akhir dari tata kelola yang baik, tetapi juga menjadi faktor yang memperkuat keberlanjutan praktik transparansi dan akuntabilitas di tingkat pemerintahan daerah.

Sintesis Kritis dan Kontribusi Teoretis

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil sinergi antara tata kelola internal yang kuat dan pemanfaatan transformasi digital yang efektif. Kualitas sistem pengendalian internal dan manajemen berbasis kinerja memastikan keandalan informasi, sementara digitalisasi memperluas akses publik terhadap data keuangan. Transparansi yang terbentuk dari integrasi tersebut mendorong peningkatan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Secara teoretis, penelitian ini mengintegrasikan teori keagenan, teori legitimasi, dan perspektif governance dalam satu kerangka analitis. Transparansi dipahami sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi, membangun legitimasi sosial, serta mencerminkan kualitas tata kelola. Dengan menempatkan kepercayaan publik sebagai implikasi utama, penelitian ini memperkaya literatur akuntansi sektor publik dengan menegaskan bahwa tujuan akhir transparansi dan akuntabilitas adalah penguatan trust dan legitimasi institusional pemerintah daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil integrasi berbagai penelitian terdahulu, transparansi laporan keuangan pemerintah daerah menempati posisi sentral dalam memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Transparansi tidak sekadar dimaknai sebagai publikasi laporan keuangan, tetapi sebagai proses keterbukaan informasi yang mudah diakses, dipahami, lengkap, dan relevan bagi masyarakat. Dengan demikian, transparansi mencerminkan komitmen nyata pemerintah daerah terhadap akuntabilitas dan keterbukaan publik.

Literatur menunjukkan bahwa transparansi berkorelasi erat dengan peningkatan akuntabilitas. Penyajian informasi keuangan yang terbuka dan dapat diverifikasi mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat, memperkecil potensi kecurigaan, serta meningkatkan persepsi terhadap integritas aparatur. Dampaknya, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah cenderung menguat. Namun, transparansi yang bersifat formalistik dan hanya berorientasi pada kepatuhan regulatif tidak selalu menghasilkan efek serupa, terutama jika informasi sulit dipahami atau kurang relevan.

Kajian ini juga menegaskan bahwa transparansi eksternal sangat bergantung pada kualitas tata kelola internal, termasuk sistem pengendalian internal dan manajemen berbasis kinerja. Selain itu, digitalisasi pelaporan keuangan memperluas akses informasi, meskipun efektivitasnya bergantung pada kapasitas sumber daya manusia dan literasi publik.

Secara konseptual, penelitian ini merumuskan model integratif yang menempatkan transparansi sebagai penghubung antara tata kelola internal dan kepercayaan publik melalui mekanisme akuntabilitas. Dengan menggabungkan perspektif teori keagenan, teori legitimasi, dan governance, studi ini memberikan kontribusi teoretis sekaligus dasar bagi pengembangan kebijakan keuangan daerah yang lebih terbuka dan berorientasi pada penguatan trust masyarakat.

Daftar Pustaka

- Afri, & Mulia, R. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Aplikasi dalam Peningkatan Kinerja)*. CV Eureka Media Aksara.
- Albahrudin, K. F., Putra, H. S., & Wardhaningrum, O. A. (2023). MELALUI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DI INTERNET SAAT PANDEMI COVID-19. *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 3(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.25047/asersi.v3i1.3945>
- Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting : An Empirical Study in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 13(4), 831–842. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642>
- Booth, W. C., Colomb, G., & Williams, J. M. (2016). *The Craft of Research (4th ed)*. University of Chicago Press.
- Irmawati, Haliah, & Nirwana. (2025). Digital Transformation of Public Sector Accounting : A Literature Review on Technology Adoption in Government Financial Reporting. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 7(2), 228–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/tgypp081>
- Jannah, M., Haliah, & Nirwana. (2025). Transparency and Accountability in Local Government Financial Reporting: A Systematic Literature Review. *Social Sciences Insights Journal*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.60036/mcdegf56>
- Judijanto, L., Sudarmanto, E., & Triyantoro, A. (2024). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Laporan Keuangan Sektor Publik. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen West Science*, 3(02), 223–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.58812/jbmws.v3i02.1160>
- Mahruzal, M., Ritonga, T. Q. B., Aula, N., & Khaddafi, M. (2024). A Review of Accountability and Transparency in Regional Financial Management Literature in Public Sector Accounting.

Global Journal of Business, Economics & Social Development, 2(November), 84–90.
<https://doi.org/10.56225/gjbesd.v2i2.53>

Rosalinda, A., Aulia, F., Syifa, M. H., Hadawiyah, S. R., & Viani. (2025). The Role of Public Sector Accounting in Realizing Accountability and Transparency in Local Government Financial Management: A Case Study of the Jakarta Provincial Government. *International Journal of Asian Business and Development*, 1(3), 157–168.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55927/metropolis.v1i3.274>

Santoso, E. B., Prasetyo, A., & Gaol, L. L. (2024). Penguatan Tata Kelola Keuangan Publik melalui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(1), 126–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/mwca7592>

Siahay, A. Z. D. (2023). Public Accounting As A Pillar of Financial Governance: A Literature Review on Government Tranparency and Accountability. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2825–2834.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.15867>

Snyder, H. (2019). Literature Review as A Research Methodology: An Overview and Guildelines. *Journal of Business Research*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ibusres.2019.07.039>